



Pengaruh Inflasi Terhadap Pembagian Dividen Pada BUMN : Studi Kasus Sektor Pertambangan

Dodi Firman Syah¹, Haryadi², Siti Hodijah³, Nurhayani⁴
1,2,3,4 Universitas Jambi

*Corresponding author, email; dodifirmansyahjambi@gmail.com, haryadi@unja.ac.id, sitihodijah@unja.ac.id, nurhayani@unja.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus 2025
Revised September 2025
Accepted December 2025
Available online
<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:

Inflation, State Equity
Participation, Dividends, ROA,
State-Owned Mining
Enterprises

Turabian style in citing this article: [citation Heading]
Dodi Firman Syah, Siti Hodijah, Nurhayani " Pengaruh Inflasi Terhadap Pembagian Dividen Pada BumN : Studi Kasus Sektor Pertambangan" *Journal of Sharia Economics* 7, No. 2 Dec: 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of State Capital Participation (PMN) and inflation on dividend policy in mining companies during the 2020–2024 period. The analytical method used is a panel regression with a fixed effects approach on four state-owned enterprises (SOEs), resulting in a total of 20 observations. The estimation results show that the model is able to significantly explain variations in dividend changes, with an R-squared value of 0.9279, while the F-statistic is 36.037 with a significance level of 0.0000, indicating that the independent variables simultaneously influence dividends. Partially, PMN has a negative and significant effect on dividends, with a coefficient of -0.4381 and a probability value of 0.0000, indicating that an increase in PMN has the potential to reduce dividend payments. Meanwhile, the inflation variable shows a positive but insignificant effect on dividends, with a coefficient of 1.0471 and a probability value of 0.0908. These findings indicate that internal company factors related to PMN funding policies play a dominant role in determining dividend amounts, compared to external macroeconomic factors such as inflation. The resulting regression model is: $DIVIDEND = 7.8311 - 0.4381PMN + 1.0472Inflation$. The results of this study also imply that increasing PMN allocations must be balanced with operational and profitability strategies to avoid suppressing the company's ability to distribute dividends.

PENDAHULUAN

Dividen merupakan salah satu komponen penting dalam kebijakan keuangan perusahaan yang mencerminkan bentuk distribusi laba kepada pemegang saham. Pembagian dividen ini tidak hanya menjadi indikator keberhasilan kinerja keuangan Perusahaan yang bersangkutan, tetapi juga berfungsi sebagai sinyal bagi investor mengenai prospek dan stabilitas perusahaan di masa akan datang. Oleh karena itu, kebijakan dividen sering dipandang sebagai hasil dari keseimbangan antara kepentingan perusahaan dalam mempertahankan dana internal untuk ekspansi, dan kepentingan pemegang saham dalam memperoleh pengembalian atas investasi yang mereka tanamkan pada Perusahaan tersebut.

Selain itu juga, besaran dividen yang akan dibagikan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal perusahaan seperti profitabilitas (ROA, ROE), struktur modal, total aset, serta likuiditas perusahaan. Faktor eksternal seperti tingkat suku bunga, inflasi, dan kebijakan makroekonomi juga berpengaruh terhadap kemampuan dan kebijakan perusahaan dalam membagikan dividen ke Negara. Dalam kondisi tertentu, perusahaan yang memiliki laba besar belum tentu membagikan dividen tinggi ke Negara karena adanya kebutuhan untuk menahan laba guna membiayai proyek investasi atau menjaga stabilitas keuangan jangka Panjang Perusahaan tersebut.

Dalam konteks perusahaan BUMN, pembagian dividen juga memiliki arah strategis karena berkontribusi langsung terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Oleh karenanya, analisis terhadap tren pembagian dividen selama beberapa tahun terakhir menjadi penting untuk memahami bagaimana pola kebijakan korporasi, kondisi ekonomi global, serta harga komoditas memengaruhi kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Berikut ini akan disajikan data perkembangan pembagian dividen empat perusahaan BUMN sektor pertambangan, yaitu PT Timah (TINS), PT Aneka Tambang (ANTM), PT Bukit Asam (PTBA), dan PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), selama periode 2020–2024.

Tabel 1 Dividen Perusahaan BUMN Sektor Pertambangan
Tahun 2020 - 2024

Perusahaan	Dividen (Miliar Rupiah)				
	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PT Timah	0	455	455,97	312,44	474,65
PT Antm	402,30	930,90	1.910,50	1.790,00	3.600
PT Inalum	698,00	900,00	18.223,00	18.223,00	2.020,00
PT Bukit Asam	835,39	3.651,20	12.600,00	4.580,00	3.827,79

(Sumber : Annual Report BUMN, 2024)

Tabel 1 ini menunjukkan perkembangan besaran dividen yang dibagikan oleh empat perusahaan BUMN sektor pertambangan selama periode 2020–2024. Secara umum, nilai dividen mengalami fluktuasi, dengan beberapa perusahaan menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun-tahun tertentu. PT Timah mulai membagikan dividen kembali setelah tahun 2020 yang bernilai nol, dan pada tahun 2024 dividen meningkat menjadi Rp 474,65 miliar. PT Antam juga memperlihatkan tren kenaikan yang konsisten, dari Rp 402,30 miliar pada 2020 menjadi Rp 3,6 triliun pada 2024.

PT Inalum mencatat lonjakan sangat tajam pada tahun 2022 dan 2023,

mencapai Rp 18,223 triliun, sebelum mengalami penurunan menjadi Rp 2,02 triliun pada 2024. Sementara itu, PT Bukit Asam membagikan dividen yang juga fluktuatif, dengan puncaknya pada tahun 2022 sebesar Rp 12,6 triliun, sebelum turun pada tahun 2023 dan 2024. Fluktuasi dividen ini mencerminkan kinerja keuangan masing-masing perusahaan yang dipengaruhi oleh kondisi pasar komoditas, laba bersih, serta kebijakan distribusi dividen pada periode tersebut.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang peran strategis dalam pembangunan ekonomi secara nasional, baik sebagai pelaku bisnis yang berorientasi pada keuntungan (profit oriented) maupun juga sebagai agen pembangunan (agent of development) untuk negara secara makroekonomi. Selain berfungsi menghasilkan laba, BUMN juga berkontribusi besar terhadap penerimaan negara, salah satunya melalui pembayaran dividen. Dalam konteks kebijakan fiskal, dividen dari BUMN merupakan salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mendukung pembiayaan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Untuk memperkuat struktur permodalan dan kinerja keuangan BUMN, pemerintah menyalurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Perusahaan BUMN Sektor Pertambangan. PMN merupakan bentuk investasi pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sumber lain yang sah, yang bertujuan meningkatkan kapasitas usaha BUMN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016, PMN dapat berupa dana tunai, Barang Milik Negara (BMN), konversi piutang, atau aset negara lainnya yang dialihkan menjadi modal BUMN untuk penyaluran PMN.

Efektivitas PMN dalam meningkatkan kontribusi dividen untuk negara masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Secara teoritis, peningkatan modal semestinya dapat memperkuat kapasitas investasi dan profitabilitas, sehingga laba dan dividen yang disetorkan kepada negara meningkat seharusnya. Meskipun dalam praktiknya, beberapa BUMN penerima PMN justru mengalami penurunan kinerja atau belum menunjukkan peningkatan dividen yang signifikan dalam jangka pendek. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah PMN benar-benar berdampak positif terhadap pembagian dividen atau hanya menambah aset tanpa memperbaiki profitabilitas.

Penyertaan Modal Negara (PMN) merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui PMN, pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan aset, produktivitas, serta kemampuan BUMN dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, baik dalam bentuk dividen maupun pajak. Dalam konteks sektor pertambangan, PMN sangat berperan penting untuk mendukung menyongsong program hilirisasi yang di gadangkan oleh pemerintah, peningkatan nilai tambah komoditas mineral, serta penguatan daya saing perusahaan di pasar global.

Tabel berikut menyajikan data perkembangan PMN yang diterima oleh empat

BUMN sektor pertambangan, yaitu PT Timah (TINS), PT Aneka Tambang (ANTM), PT Bukit Asam (PTBA), dan PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) selama periode 2020–2024

Tabel 2 Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Perusahaan BUMN Sektor Pertambangan Tahun 2020 - 2024

Perusahaan	Penyertaan Modal Negara (Miliar Rupiah)				
	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PT Timah	7.166.000	0	0	0	0
PT Antm	3.934.833	3.934.833	3.934.833	3.934.833	3.494.820
PT Inalum	1.727.500	0	0	0	0
PT Bukit Asam	0	0	0	0	0

(Sumber : Annual Report BUMN, 2024)

Tabel 2 menggambarkan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk empat perusahaan BUMN sektor pertambangan selama periode 2020–2024. Secara umum, pemberian PMN hanya terjadi pada tahun-tahun tertentu dan lebih terfokus pada dua perusahaan, yaitu PT Timah dan PT Antam. PT Timah menerima PMN terbesar pada tahun 2020 sebesar Rp 7.166 miliar dan tidak menerima alokasi lagi pada periode setelahnya. PT Antam memperoleh PMN secara berulang selama 2020–2023 sebesar Rp 3.934,833 miliar per tahun, sebelum turun menjadi Rp 3.494,820 miliar pada tahun 2024.

Sementara itu, PT Inalum hanya memperoleh PMN pada tahun 2020 sebesar Rp 1.727,500 miliar, dan tidak ada tambahan pada tahun-tahun berikutnya. PT Bukit Asam tidak menerima PMN sepanjang periode yang diamati, menunjukkan bahwa kebutuhan pendanaan atau kebijakan pemerintah terhadap perusahaan ini berbeda dengan perusahaan lainnya. Pola alokasi PMN ini mencerminkan prioritas pemerintah dalam mendukung permodalan perusahaan tertentu pada fase awal periode, sementara pada tahun berikutnya lebih mengandalkan kinerja dan pendapatan internal perusahaan masing-masing.

Secara keseluruhan, tren kenaikan PMN ini sangat mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat BUMN strategis di sektor pertambangan sebagai motor penggerak hilirisasi sumber daya mineral nasional dan peningkatan kontribusi terhadap perekonomian negara dalam pembagian dividen untuk menunjang penambahan penerimaan negara bukan pajak.

Sektor pertambangan menjadi fokus penelitian ini karena memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan negara dan karakteristik bisnis yang padat modal. BUMN pertambangan seperti PT Bukit Asam (PTBA), PT Aneka Tambang (ANTM), PT Timah

(TINS), dan PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) merupakan penerima PMN dalam beberapa periode. Dengan adanya tambahan modal negara yang telah disiapkan tiap tahunnya, diharapkan BUMN tersebut mampu memperbesar kapasitas produksi dari masing-masing perusahaan, memperkuat struktur keuangan mereka, dan meningkatkan laba bersih Perusahaan sehingga dapat membayarkan dividen yang lebih besar kepada negara.

Selain PMN, faktor-faktor makroekonomi seperti inflasi mempengaruhi kebijakan dividen. Sedangkan inflasi yang tinggi juga dapat menggerus daya beli dan margin keuntungan Perusahaan BUMN. sehingga berpotensi meningkatkan dividen untuk negara.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis sejauh mana Inflasi dan PMN berpengaruh terhadap pembagian dividen pada BUMN sektor pertambangan, sebagai dasar bagi kebijakan pengelolaan modal negara dan optimalisasi penerimaan dividen untuk menambah penerimaan negara bukan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan dividen merupakan salah satu keputusan penting dalam keuangan perusahaan yang menentukan pembagian laba kepada pemegang saham. Menurut teori *Modigliani dan Miller (Irrelevance Theory)*, dalam pasar sempurna, kebijakan dividen tidak memengaruhi nilai perusahaan karena nilai ditentukan oleh profitabilitas dan risiko investasi. Namun, dalam praktiknya, asumsi pasar sempurna jarang terpenuhi sehingga muncul teori lain seperti *Bird-in-the-Hand* yang menyatakan bahwa dividen saat ini lebih dihargai dibanding capital gain yang tidak pasti. Teori *Signaling* juga menegaskan bahwa kenaikan dividen memberi sinyal positif terhadap prospek laba perusahaan, sedangkan *Agency Theory* menyebutkan bahwa dividen berfungsi mengurangi konflik keagenan dengan membatasi penggunaan dana bebas oleh manajemen.

Penyertaan Modal Negara (PMN) secara teoritis dapat dijelaskan melalui *Public Investment Theory* dan *Public Finance Theory*, di mana pemerintah menempatkan dana ke BUMN untuk memperkuat modal dan mendukung proyek strategis nasional. Dari perspektif *Capital Structure Theory*, PMN meningkatkan ekuitas dan menurunkan leverage sehingga memperbaiki posisi keuangan perusahaan. Selain itu, teori agensi memandang PMN sebagai bentuk kontrol pemerintah terhadap manajemen agar kinerja dan akuntabilitas meningkat. Secara empiris, peningkatan PMN diharapkan mampu memperkuat kemampuan investasi dan profitabilitas BUMN, yang pada akhirnya meningkatkan dividen, meskipun dalam jangka pendek dapat menekan pembagian laba karena kebutuhan reinvestasi. Ukuran perusahaan yang diukur melalui total aset mencerminkan kapasitas ekonomi dan stabilitas operasional perusahaan. Berdasarkan teori ukuran perusahaan, entitas

dengan aset besar cenderung memiliki akses pendanaan yang lebih baik, risiko yang lebih rendah, serta kemampuan menghasilkan laba yang lebih stabil. Hal ini membuat perusahaan dengan aset besar lebih mungkin membagikan dividen secara konsisten karena memiliki arus kas yang kuat dan kepercayaan investor yang tinggi. Dengan demikian, total aset berperan penting dalam menjelaskan variasi kebijakan dividen antarperusahaan.

Profitabilitas yang diukur melalui Return on Assets (ROA) menggambarkan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Berdasarkan teori profitabilitas dan teori *signaling*, perusahaan dengan ROA tinggi memiliki kemampuan membayar dividen yang lebih besar sekaligus memberikan sinyal positif kepada pasar mengenai kinerja keuangannya. Hubungan ini sejalan dengan teori dividen residual yang menyatakan bahwa setelah kebutuhan investasi terpenuhi, laba sisa yang diperoleh dapat digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham.

Sementara itu, faktor makroekonomi seperti suku bunga dan inflasi turut memengaruhi kebijakan dividen. Berdasarkan *Asset Pricing Theory* dan *Cost of Capital Theory*, kenaikan suku bunga meningkatkan biaya modal dan mengurangi preferensi perusahaan untuk membayar dividen, karena dana lebih dibutuhkan untuk pembiayaan internal. Dalam kondisi inflasi tinggi, teori nilai riil menjelaskan bahwa perusahaan cenderung menahan laba guna menjaga likuiditas dan modal kerja. Bagi sektor pertambangan, inflasi juga berdampak pada biaya produksi serta harga komoditas, yang dapat memengaruhi laba bersih dan besaran dividen yang dibagikan kepada negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel Inflasi, Penyertaan Modal Negara (PMN), Return on Assets (ROA) terhadap pembagian dividen pada BUMN sektor pertambangan. Pendekatan kuantitatif dipilih karena sangat memungkinkan untuk peneliti mengukur hubungan antarvariabel secara objektif dengan menggunakan data numerik yang diolah secara statistik.

Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai perkembangan indikator-indikator penelitian selama periode 2020–2024, sedangkan metode verifikatif digunakan untuk menguji pengaruh antarvariabel melalui model regresi data panel. Penelitian ini berorientasi pada pengujian hipotesis dengan bantuan perangkat lunak EViews versi 12.

Populasi dan Sampel Penelitian ini adalah 4 BUMN sektor pertambangan yang terdaftar pada Kementerian BUMN Republik Indonesia dan Bursa Efek Indonesia. Adapun sampel penelitian ditentukan secara purposive sampling dengan kriteria:

1. BUMN yang bergerak di bidang pertambangan dan energi mineral.

2. Menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) selama periode 2020–2024.
3. Menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap selama periode pengamatan.

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh empat perusahaan sebagai sampel : PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM), PT Timah (Persero) Tbk (TINS), PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Tbk (INALUM)

Model analisis yang digunakan adalah regresi data panel, karena data penelitian menggabungkan dimensi waktu (time series) dan individu (cross section). Model umum persamaan regresi panel adalah:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Pembagian dividen BUMN ke-I pada tahun t

X_{1it} = Inflasi

X_{2it} = Penyertaan Modal Negara (PMN)

X_{3it} = ROA

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ Koefisien regresi masing-masing variabel

Metode Estimasi dan Uji Model

Analisis regresi data panel dilakukan melalui tiga pendekatan model:

1. Common Effect Model (CEM) – mengasumsikan bahwa pengaruh antarindividu dan waktu adalah sama.
2. Fixed Effect Model (FEM) – memperhitungkan perbedaan spesifik antar-BUMN.
3. Random Effect Model (REM) – mengasumsikan variasi antarindividu bersifat acak.

Pemilihan model terbaik dilakukan melalui:

- Uji Chow (CEM vs FEM)
- Uji Hausman (FEM vs REM)
- Uji Lagrange Multiplier (LM) (REM vs CEM)

Hasil uji menunjukkan bahwa model terbaik dalam penelitian ini adalah **Fixed Effect Model (FEM)**, karena nilai probabilitas uji Hausman < 0,05.

Uji Hipotesis

Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujian:

- Jika nilai *p-value* < 0,05 → variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Y.

Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap pembagian dividen secara parsial.

Kriteria:

- Jika $p\text{-value} < 0,05$ → variabel berpengaruh signifikan.
- Jika $p\text{-value} \geq 0,05$ → tidak signifikan.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Uji ini mengukur sejauh mana variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai Adjusted R² mendekati 1 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang baik.

Prosedur Analisis

Langkah-langkah analisis dilakukan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data sekunder dari sumber resmi (BUMN, BI, BPS, Kemenkeu).
2. Mengolah data menjadi panel (4 perusahaan × 5 tahun = 20 observasi).
3. Melakukan uji statistik deskriptif dan asumsi klasik.
4. Menentukan model terbaik menggunakan uji Chow dan Hausman.
5. Melakukan uji F, uji t, dan uji Adjusted R².
6. Menginterpretasikan hasil analisis untuk menarik kesimpulan empiris.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum BUMN Sektor Pertambangan 2020–2024

BUMN sektor pertambangan di Indonesia memainkan peran penting dalam penyediaan energi dan sumber daya mineral. Empat BUMN utama yang menjadi sampel penelitian — PT Bukit Asam (PTBA), PT Aneka Tambang (ANTM), PT Timah (TINS), dan PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) — memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara baik dalam bentuk pajak, royalti, maupun dividen.

Selama periode 2020–2024, sektor pertambangan menghadapi fluktuasi harga komoditas global, terutama batu bara, timah, dan nikel. Tahun 2020 menjadi titik terendah akibat pandemi COVID-19, namun pemulihan terjadi pada 2021–2022 dengan peningkatan harga batu bara dan nikel yang mendorong lonjakan laba BUMN.

Kementerian Keuangan mencatat bahwa total Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN pertambangan dalam periode tersebut mencapai Rp 21,3 triliun, dengan porsi terbesar diterima oleh INALUM untuk penguatan holding industri tambang MIND ID. Dampak dari PMN tersebut mulai terlihat pada tahun 2022–2024 melalui peningkatan laba bersih dan dividen yang disetorkan ke negara.

Hasil Uji Model

Pemilihan Model Regresi Panel

Berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman, diperoleh nilai $p\text{-value} < 0,05$, yang menunjukkan bahwa model **Fixed Effect Model (FEM)** adalah model yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Model ini mempertimbangkan perbedaan karakteristik masing-masing BUMN secara individu.

Hasil Regresi Data Panel

Hasil estimasi model regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect disajikan pada tabel berikut:

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.831082	0.618613	12.65910	0.0000
PMN	-0.438134	0.040321	-10.86611	0.0000
INFLASI	1.047173	0.576506	1.816411	0.0908

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.927904	Mean dependent var	6.437180
Adjusted R-squared	0.902156	S.D. dependent var	2.402533
S.E. of regression	0.751514	Akaike info criterion	2.509872
Sum squared resid	7.906831	Schwarz criterion	2.808591
Log likelihood	-19.09872	Hannan-Quinn criter.	2.568185
F-statistic	36.03721	Durbin-Watson stat	1.980594
Prob(F-statistic)	0.000000		

Tabel hasil estimasi menunjukkan bahwa model regresi dengan pendekatan fixed effect (cross-section) mampu menjelaskan hubungan antara variabel Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Inflasi terhadap variabel dependen yaitu Dividen pada perusahaan BUMN sektor pertambangan. Nilai R-squared sebesar 0,9279 menunjukkan bahwa sebesar 92,79% variasi dividen dapat dijelaskan oleh variabel PMN dan inflasi, sementara sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai Adjusted R-squared yang masih tinggi (0,9022) mengonfirmasi stabilitas dan kecocokan model.

Dari sisi signifikansi model, terlihat bahwa Prob(F-statistic) = 0.0000, artinya model secara simultan signifikan pada tingkat keyakinan 99%, sehingga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembagian dividen. Koefisien konstanta (C) bernilai 7,831082 dan signifikan pada taraf 1%, yang merepresentasikan dividen rata-rata ketika PMN dan inflasi berada pada kondisi netral.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap pembagian dividen pada BUMN sektor pertambangan periode 2020–2024, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

PMN tidak meningkatkan dividen dalam jangka pendek, bahkan bersifat negatif, karena PMN lebih diarahkan untuk pembiayaan aset dan ekspansi korporasi dan Inflasi memiliki efek positif terhadap pembagian dividen, terutama ketika harga komoditas menguat, sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Agung Satrio, R., Amalia, N., & Priyono, A. (2025). *Pengaruh Penyertaan Modal Negara terhadap Pembagian Dividen BUMN dengan Penugasan sebagai Variabel Moderasi*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 18(2), 145–159.
- Andreas Mada, & Titis Wahyu Dati. (2022). *Analisis Pengaruh PMN, Solvabilitas, dan Pertumbuhan Aset terhadap Kinerja Keuangan BUMN*. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 10(1), 55–70.
- Gordon, M. J. (1963). *Optimal Investment and Financing Policy*. *The Journal of Finance*, 18(2), 264–272.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Lintner, J. (1956). *Distribution of Incomes of Corporations among Dividends, Retained Earnings, and Taxes*. *The American Economic Review*, 46(2), 97–113.
- Rossieta, H., Nurul, A., & Puspita, D. (2025). *State Ownership, Corporate Missions, and Accountability of Dividend Policy*. *International Journal of Public Sector Performance*, 12(1), 33–50.
- Warisman, & Amwila, M. (2022). *Pengaruh Struktur Modal dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan Pertambangan*. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 9(3), 115–128.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.